

HUBUNGAN ANTARA KINERJA PROGRAM CSR DENGAN POTENSI KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN

(Relation between Corporate Social Responsibility Program Performance and Social Conflict Potencies in Mining Areas Community)

Widya Hasian Situmeang¹⁾ dan Mahmudi Siwi¹⁾

¹⁾ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia
E-mail: widyahasians@gmail.com; mahmudisiwi@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

Mining corporations were a kind of industry that supposed to run corporate social responsibility (CSR). The government has set the law about the implementation of CSR. CSR implementation was one of the ways to reduce conflict between corporation and community around the mining area. This research conducted to reveal the correlation between CSR implementation and social conflict potencies, both vertically and horizontally in community around mining area. This research used quantitative method and supported by qualitative data in Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, using Rank Spearman correlation test. The result of this research by quantitative approach reveal no correlations between CSR implementation by a mining corporation in West Java with conflict potency, both vertically and horizontally. Otherwise, qualitative data were collected during the research; give some explanations why there was no correlation between variable of CSR implementation and social conflict potency in mining area community.

Keywords: *CSR performance, vertical conflict, horizontal conflict*

ABSTRAK

Perusahaan pertambangan adalah unit usaha yang wajib menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengaturan tentang CSR telah disusun dalam bentuk undang-undang oleh pemerintah. Implementasi CSR merupakan salah satu mekanisme untuk mengurangi potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah operasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pelaksanaan CSR dengan potensi konflik sosial, baik vertikal maupun horizontal pada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif, di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor dengan menggunakan analisis korelasi *rank spearman*. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan nyata antara implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Jawa Barat dengan potensi konflik, baik vertikal maupun horizontal. Namun, menurut data kualitatif menunjukkan bahwa kinerja CSR perusahaan mampu menurunkan potensi konflik vertikal antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Kata kunci: kinerja CSR, konflik vertikal, konflik horizontal

PENDAHULUAN

Aktivitas pertambangan merupakan salah satu kegiatan produksi yang banyak dilakukan di Indonesia. Berbagai korporasi, baik swasta maupun BUMN bermunculan untuk memanfaatkan hasil bumi melalui aktivitas pertambangan. Dalam penelitiannya, Prayogo

(2010) menyebutkan bahwa aktivitas bisnis pertambangan memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu kemakmuran, pemenuhan energi dan mineral untuk masyarakat, akan tetapi juga memiliki dampak bagi lingkungan dan sosial.

Sebagai kesadaran dalam rangka mempertanggungjawabkan kegiatan produksi

yang dilakukan korporasi, maka sejak lama telah lahir praktek CSR (*corporate social responsibility*) (Ambadar 2008). Pada awalnya CSR memang berupa kesadaran korporasi tanpa ada perumusan kebijakan yang diatur dalam bentuk legal. Beberapa korporasi besar di dunia sejak awal telah rutin turut memperhatikan kesejahteraan pegawai, maupun memberikan bantuan kepada masyarakat yang hidup di sekitar wilayah operasional mereka. Kemudian, berbagai studi dan pengukuran, serta penghargaan demi penghargaan dicetuskan untuk mengapresiasi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi terhadap lingkungan dan sosial. Kajian dan studi tentang praktek CSR pun mulai digagas dengan melihat dari berbagai sudut pandang (Sukada dkk 2007).

Banyak ahli telah mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan CSR. Kategori-kategori tingkatan CSR juga telah dirumuskan seperti yang dikutip Nasdian (2014) dari Zaidi dan Abidin (2003) yang menyatakan terdapat tiga kategori pelaksanaan CSR: level *charity*, *filantropi* dan *corporate citizenship*. Praktek CSR seharusnya dilandaskan pada kerelaan dan kesadaran perusahaan untuk bertanggungjawab atas kegiatan usahanya di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, praktek CSR tidak jarang hanya dilakukan sebatas pemenuhan tuntutan regulasi dari pemerintah dan menghindari sanksi semata.

Di Indonesia, memang telah terdapat regulasi yang mewajibkan semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Akan tetapi regulasi ini juga dinilai masih memiliki kekurangan, misalnya tidak mencantumkan besaran nilai yang harus dibayarkan perusahaan sebagai tanggung jawab atas eksploitasi sumber alam pada masyarakat (Ambadar 2008). Kekurangan inilah yang kemudian menyebabkan masih terdapatnya konflik antara perusahaan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa dasar kinerja CSR yang diacu beberapa korporasi didasarkan dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Misalnya dalam studinya terhadap efektivitas program CSR atau *Community*

Development dalam pengentasan kemiskinan pada salah satu korporasi di Jawa Barat, Prayogo dan Hilarius (2012) menyatakan bahwa perhatian korporasi dalam mengentaskan kemiskinan dilakukan pada beberapa sektor yaitu ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh korporasi melalui CSR masih berada pada kategori rendah.

Perubahan sosial dengan masuknya korporasi tentu menciptakan berbagai gejala sosial yang salahsatunya dapat saja berupa konflik. Interaksi antara korporasi pertambangan dan masyarakat di sekitarnya, bisa saja berupa interaksi yang membangun (*assosiatif*) ataupun interaksi yang justru saling menjatuhkan (*assosiatif*). Bahkan tidak jarang interaksi antara korporasi dan masyarakat di sekitarnya berubah menjadi konflik baik bersifat laten hingga terbuka (Prayogo 2011). Beberapa studi tentang konflik korporasi, misalnya studi yang dilakukan oleh Prayogo (2010), mencoba mengaitkan antara relasi perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan dengan konflik yang terjadi antara korporasi tersebut dengan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Salah satu tulisannya bahkan menyarankan perusahaan-perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat agar melakukan *corporate social responsibility* sebagai salah satu langkah yang dapat ditempuh korporasi dalam resolusi konflik. Prayogo merekomendasikan hal ini sebagai operasionalisasi konsep keadilan dan pemerataan yang dapat ditempuh perusahaan agar masyarakat di sekitar wilayah operasional turut merasakan dampak positif atas keberadaan korporasi di sekitar tempat tinggal mereka. Secara sosial, program CSR/CD yang berhasil akan meningkatkan *social legitimacy* atas keberadaan dan operasi korporasi di komunitas lokal. Legitimasi sosial berkaitan dengan bagaimana masyarakat lokal dalam lingkungan operasi tambang dan migas menerima kehadiran dan kegiatan eksploitasi sumber alam (Prayogo 2011).

Salah satu perusahaan pertambangan yang memiliki wilayah konsesi yang berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk adalah

PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk (selanjutnya disebut ITP). Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh ITP tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Sama halnya dengan korporasi lainnya, ITP dalam menjalankan CSR juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Latar belakang tersebut kemudian memunculkan pertanyaan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu **bagaimanakah hubungan keberhasilan program Corporate Social Responsibility(CSR) yang dilakukan ITP terhadap potensi konflik sosial pada masyarakat di sekitar wilayah konsesi?**

Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, maka perlu dilakukan beberapa pengamatan baik pada perusahaan, khususnya pada pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh PT ITP. Hal ini memunculkan pertanyaan spesifik, **bagaimanakah pelaksanaan program CSR bagi masyarakat di sekitar ITP?**

Selanjutnya, setelah mengidentifikasi pelaksanaan CSR PT ITP, perlu diketahui apakah terdapat potensi konflik di sekitar wilayah tambang PT ITP. Menurut Fisher dkk (2001) konflik dapat dibedakan menjadi konflik horizontal dan konflik vertikal. Hal ini memunculkan pertanyaan khusus kedua, yaitu, **apakah terdapat potensi konflik di masyarakat sekitar wilayah konsesi ITP, baik horizontal maupun vertikal?**

Hasil dari kedua pertanyaan penelitian diatas, akan memunculkan pertanyaan lanjutan yang berusaha melihat benang merah atas kinerja CSR PT ITP dan potensi konflik sosial: **apakah keberhasilan pelaksanaan CSR memiliki hubungan dengan potensi konflik sosial di masyarakat sekitar wilayah pertambangan?**

PENDEKATAN TEORITIS

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu isu penting dalam bisnis korporasi. Pemerintah Indonesia telah memformulasikan kebijakan tentang CSR dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan, khususnya pada

pasal 74 menegaskan bahwa suatu korporasi atau perusahaan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila tanggung jawab ini tidak dilaksanakan maka korporasi dapat dikenai sanksi sesuai yang tertera pada undang-undang tersebut.

Konsep *Corporate social responsibility* (CSR) dan Pengembangan Masyarakat

Dalam pandangan pengembangan masyarakat, CSR merupakan salah satu konsep yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat (Nasdian 2014). Akan tetapi, dalam tulisan Prayogo dan Hilarius (2012) pengembangan masyarakat justru merupakan bagian dari aktivitas CSR. Secara sosial, kinerja program CSR dan CD pada gilirannya dapat menentukan seberapa besar penerimaan sosial para pemangku kepentingan (utamanya komunitas sekitar) atas komitmen, kehadiran dan tindakan korporasi secara umum (Prayogo 2011). Hal ini senada dengan pendapat Ambadar (2008) bahwa pengembangan masyarakat diyakini merupakan sebuah aktualisasi dari CSR yang lebih bermakna dari pada sekedar aktivitas kedermawanan semata. Ardianto dan Machfudz (2011) juga mengatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah aktualisasi CSR. Pengembangan masyarakat adalah corak utama dalam CSR.

Pelaksanaan CSR juga dapat dievaluasi. Berbagai peneliti telah mencoba merumuskan pengukuran efektivitas dan efisiensi kinerja program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang ditinjau dari berbagai segi seperti berdasarkan partisipasi, keberlanjutan dan pengukuran lainnya. Prayogo (2011) merumuskan substansi evaluasi program CSR berdasarkan dimensi tipologi wilayah dan komunitas; tipologi desa; tipologi komunitas; program CSR dan CD yang diukur melalui: manfaat, kesesuaian, keberlanjutan, dampak, organisasi, dan aspek lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan; serta dimensi potensi, yang terdiri dari sumber alam, sumber daya manusia, organisasi, akses, dan aspek lokalitas lainnya.

Dalam kaca mata pengembangan masyarakat, CSR pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh sebagai usaha pengembangan masyarakat. Dari studi-studi

terdahulu yang telah dilaksanakan, upaya pengembangan masyarakat tidak pernah terlepas dari pemberdayaan. Pemberdayaan itu sendiri adalah jalan menuju partisipasi (Rosyida dan Nasdian 2011). Terdapat beberapa teori yang menjelaskan partisipasi, bahkan mencoba merumuskan tingkatannya berdasarkan posisi subjek pemberdayaan. Salah satu teori tentang tingkatan partisipasi yang dianggap cocok dalam menganalisis partisipasi dalam program CSR yang dilakukan oleh korporasi adalah teori Cohen dan Uphoff (1979). Instrumen pengkategorian partisipasi yang digunakan didasarkan pada Cohen dan Uphoff (1979) yang membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap menikmati hasil.

Definisi Konflik Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perorangan, kelompok, maupun perorangan dengan kelompok (Gillin dan Gillin 1954 dalam Soekanto (2007). Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua yaitu: asosiatif dan disosiatif. Asosiatif merupakan proses sosial yang mendekatkan atau mempersatukan. Bentuknya adalah kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan disosiatif adalah proses sosial menjauhkan atau mempertentangkan. Bentuknya adalah persaingan, kontravensi dan konflik.

Intensitas Konflik

Menurut Prayogo (2010), intensitas konflik merupakan variabel yang paling penting bagi identifikasi dinamika konflik. Dalam konflik korporasi dan komunitas lokal, tingkat intensitas dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan, yaitu golongan dengan intensitas rendah, sedang dan tinggi. Golongan dengan intensitas rendah adalah ketika konflik hanya berwujud rumor, keresahan, dan laporan baik lisan maupun tulisan. Pada intensitas selanjutnya, konflik dapat berupa tekanan, pengancaman, dan demonstrasi massa. Intensitas tinggi terjadi ketika konflik telah disertai kekerasan fisik, penjarahan, perusakan fasilitas, menimbulkan korban luka hingga korban jiwa. Sementara menurut Musdalifah

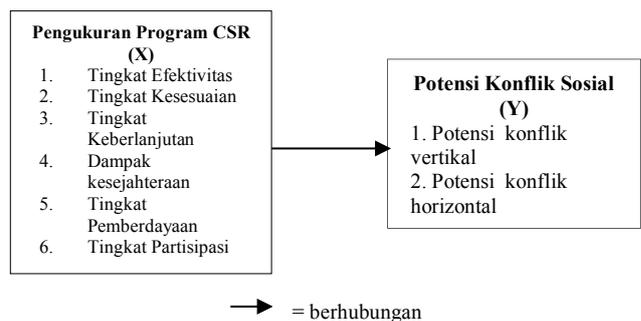
(2009), intensitas konflik dapat dilihat dari wujud konflik dan arah konflik.

Corporate Social Responsibility dan Konflik

Beberapa studi tentang konflik korporasi, misalnya studi yang dilakukan oleh Prayogo (2010), mencoba mengaitkan antara relasi korporasi dengan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan dengan konflik yang terjadi antara korporasi tersebut dengan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Salah satu tulisannya bahkan menyarankan perusahaan-perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat agar melakukan *corporate social responsibility* sebagai salah satu langkah yang dapat ditempuh korporasi dalam resolusi konflik. Prayogo merekomendasikan hal ini sebagai operasionalisasi konsep keadilan dan pemerataan yang dapat ditempuh perusahaan agar masyarakat di sekitar wilayah operasional turut merasakan dampak positif atas keberadaan korporasi di sekitar tempat tinggal mereka. Secara sosial, program CSR/CD yang berhasil akan meningkatkan *social legitimacy* atas keberadaan dan operasi korporasi di komunitas lokal. Legitimasi sosial berkaitan dengan bagaimana masyarakat lokal dalam lingkungan operasi tambang dan migas menerima kehadiran dan kegiatan eksploitasi sumber alam (Prayogo 2011).

Kerangka Pemikiran

Pengukuran dan evaluasi program CSR yang dilakukan dalam penelitian ini akan melihat relasi antara pengukuran program CSR PT ITP dengan potensi konflik sosial yang muncul antara PT ITP dan masyarakat di sekitar pertambangan. pemilihan variabel didasarkan pada beberapa pengukuran yang pernah digunakan oleh Prayogo (2011).



Gambar 1 Kerangka pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah : Keberhasilan pelaksanaan program CSR (berdasarkan tingkat efektivitas, tingkat kesesuaian, tingkat keberlanjutan, tingkat kesejahteraan, tingkat pemberdayaan, tingkat partisipasi) memiliki hubungan terhadap potensi konflik sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena Desa Lulut merupakan salah satu desa binaan CSR ITP yang berbatasan langsung dengan wilayah pertambangan. Desa Lulut juga merupakan desa yang memiliki sejarah konflik dengan ITP. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (dengan teknik survey menggunakan kuesioner) didukung oleh data kualitatif (dengan teknik wawancara mendalam). Terdapat dua subjek dalam penelitian ini yaitu responden dan informan. Responden adalah seseorang atau individu yang dapat memberikan informasi mengenai dirinya sendiri. Populasi penelitian ini ialah seluruh masyarakat desa yang merupakan penerima program CSR ITP. Selanjutnya, populasi tersebut akan dibentuk lebih sempit menggunakan kerangka sampling. Adapun sampel rumah tangga individu ditentukan untuk penelitian ialah sebanyak 30 orang responden yang merupakan penerima manfaat CSR PT ITP. Pengambilan sampel atau responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *cluster random sampling* atas seluruh penerima manfaat dari setiap program CSR PT ITP dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga.

Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh yang mewakili pihak ITP (dalam hal ini adalah koordinator lapangan Desa Lulut), tokoh pemerintahan Desa Lulut yang terdiri dari Kepala Desa hingga perangkat Desa Lulut, tokoh lokal dengan basis kampung atau RT dan RW di Desa Lulut, tokoh agama, dan beberapa informan yang merupakan masyarakat Desa Lulut.

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Dalam melakukan pengamatan langsung, peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada informan dengan mengacu pada panduan pertanyaan dan kuesioner kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner merupakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis baik yang berupa tulisan ilmiah ataupun dokumen resmi dari instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dan berguna mengenai penelitian ini. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi terkait, dalam penelitian ini seperti data dari kantor kepala desa maupun studi literatur penelitian sebelumnya.

Penelitian ini mempunyai dua jenis data yang akan diolah dan dianalisis yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diolah menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010 dan SPSS *Version* 21. Pembuatan tabel frekuensi, grafik, diagram, serta tabel tabulasi silang untuk melihat data awal responden untuk masing-masing variabel secara tunggal menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010. Kemudian SPSS *Version* 21 digunakan untuk membantu dalam uji statistik yang akan menggunakan Rank Spearman. Uji korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel yang berskala ordinal dan tidak menentukan prasyarat data terdistribusi normal. Selain itu, penulis juga menggunakan uji statistik Chi-Square untuk dua variabel yang berskala nominal.

Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Tujuan dari reduksi data ini ialah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Kedua ialah penyajian data yang berupa menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan. Penyajian data berupa narasi, diagram, dan matriks. Verifikasi adalah langkah terakhir

yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan CSR ITP di Desa Lulut

Pelaksanaan CSR ITP di Desa Lulut dilakukan berdasarkan lima pilar pelaksanaan CSR ITP, yaitu pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya-olah raga dan agama, serta keamanan. Pada tahun 2015, kelima pilar ini kemudian diturunkan dalam 21 bentuk program bantuan. Dalam pelaksanaan CSR, baik di Desa Lulut maupun di desa binaan lainnya, ITP selalu mengadakan BILIKOM (Bina Komunikasi Lingkungan) yaitu sebuah forum komunikasi antar stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan CSR ITP, baik pihak ITP, pemerintah desa, tokoh lokal Lulut, dan masyarakat Lulut.

Pengukuran program CSR adalah pengukuran yang dilakukan terhadap beberapa variabel, yaitu tingkat efektivitas program, tingkat kesesuaian program, tingkat keberlanjutan, dampak program pada kesejahteraan, tingkat pemberdayaan program, dan tingkat partisipasi dalam program. Dari masing-masing pengukuran kuantitatif, akan diperoleh data frekuensi masing-masing variabel.

Tingkat Efektivitas Program CSR ITP

Efektivitas program CSR ITP adalah kemampuan program CSR yang dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada akibat operasional yang ada, baik permasalahan lingkungan dan sosial. Program CSR yang diadakan oleh ITP seharusnya tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan di Desa Lulut yang timbul akibat adanya aktivitas korporasi dan pertambangan, serta sesuai dengan harapan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan.

Tabel 1 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat efektivitas program CSR ITP di Desa Lulut 2015

Tingkat Efektifitas	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	3	10.0
Sedang	16	53.3
Tinggi	11	36.7
Total	30	100.0

Kecenderungan responden menyatakan bahwa tingkat efektivitas program CSR masih pada tingkatan sedang ini dikarenakan masih ada pandangan bahwa bantuan yang diberikan belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi bukan berarti ITP tidak merespon sama sekali keluhan warga. Misalnya saja untuk permasalahan kerusakan rumah akibat getaran, atau permintaan warga agar ITP membuka peluang bagi warga untuk bekerja di ITP.

“begini neng, memang ITP udah memberi bantuan pada kami. Tapi ya, rasanya tidak sebandinglah dengan apa yang mereka produksi itu tiap harinya. Dulu pernah ada uang getaran buat seluruh warga, tapi ya cuman sekali dan itupun rasanya kecil...” (KSN, 57)

Perusahaan jelas merespon permintaan masyarakat dengan memberi uang getaran, dan menerima warga sebagai pekerja di ITP. Akan tetapi menurut warga, ganti rugi ataupun peluang kerja bagi mereka masih belum sebanding dengan keuntungan yang di peroleh ITP dari kegiatan produksi dan pertambangan yang mereka lakukan di Lulut.

Tingkat Kesesuaian Program CSR ITP

Tingkat kesesuaian program adalah perbandingan kesesuaian antara kesesuaian program yang dilaksanakan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat. Pemilihan program atau bantuan atau pembinaan yang dilaksanakan CSR ITP seharusnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya warga akan mengalami peningkatan kapasitas dan mempunyai rasa kepemilikan atas usaha bantuan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh CSR ITP.

Tabel 2 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat kesesuaian program CSR ITP di Desa Lulut 2015

Tingkat Kesesuaian Program	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	4	13.3
Sedang	4	13.3
Tinggi	22	73.3
Total	30	100.0

Kebutuhan masyarakat sebenarnya dapat disampaikan kepada ITP melalui Bilikom.

Bilikom adalah semacam pertemuan antara warga dan pihak CSR ITP sebagai ajang untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada ITP. Dalam Bilikom, CSR ITP juga menyosialisasikan program-program yang mereka laksanakan. Pelaksanaan Bilikom inilah yang memungkinkan terjadinya komunikasi terbuka antara masyarakat dan korporasi.

“... setahun empat kali ada Bilikom. Nanti perangkat desa, BPD dan perwakilan warga diundang untuk berdialog dengan kordes CS. Biasanya disini neng. Ini nanti terakhir bulan Desember ini kayanya ...” (AMN, 29)

Sebagian dari bantuan yang diberikan merupakan permintaan langsung dari warga, dengan mekanisme pengajuan proposal kepada CSR ITP. Sehingga, tentu saja, program yang diberikan memang sesuai dengan harapan warga. Ada pula beberapa program yang merupakan inisiatif dari CSR ITP.

Tingkat Keberlanjutan Program CSR ITP

Keberlanjutan pelaksanaan CSR dilihat dari tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. pengamatan dilakukan terhadap pendapat warga mengenai keberlanjutan CSR yang diselenggarakan ITP di Lulut dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Tabel 3 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat keberlanjutan program CSR ITP di Desa Lulut 2015

Tingkat Kesesuaian Program	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	3	10.0
Sedang	14	46.7
Tinggi	13	43.3
Total	30	100.0

Dari data kualitatif yang sudah dikumpulkan, perbedaan yang tidak terlalu signifikan ini menurut informan diakibatkan karena secara umum program yang dilaksanakan oleh ITP sudah terus menerus dilaksanakan, akan tetapi subjek penerima program memang secara bergulir dan tidak tetap. Misalnya saja penerima beasiswa, menurut Kaur Kesra Desa Lulut, penerima beasiswa di Lulut terus berganti setiap tahun, karena CSR ITP selalu mengadakan seleksi kembali setiap tahunnya.

“... setiap tahunnya ITP selalu mengadakan seleksi lagi untuk anak-anak penerimanya. Beda nggak kayak Holcim, yang penerimanya Cuma sekali seleksi terus dapat beasiswanya secara berkelanjutan ...” (AMN, 29)

Begitu pula untuk bantuan lainnya. Untuk pembangunan misalnya, bantuan hanya diberikan sekali untuk pembangunan sebuah sarana prasarana, lalu bantuan berikutnya diberikan untuk membangun sarana dan prasarana yang berbeda.

Dampak Kesejahteraan Program

Dampak program CSR terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pengukuran terhadap peningkatan kualitas dan fasilitas hidup masyarakat setelah berjalannya program CSR.

Tabel 4 Jumlah dan persentase responden menurut dampak program CSR ITP terhadap kesejahteraan di Desa Lulut 2015

Dampak Program CSR	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	26	86.7
Sedang	4	13.3
Total	30	100.0

Rendahnya dampak program CSR terhadap kesejahteraan responden ini sejalan dengan fakta bahwa responden tidak serta merta mengalami perubahan aset-aset dasar yang dimiliki. Bantuan yang diberikan CSR ITP bagi mereka tidak cukup besar untuk mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan keseharian mereka. ditambah lagi, bantuan yang didapatkan responden tidak hanya merupakan bantuan dari ITP saja. Bantuan dari pemerintah juga masih didapatkan beberapa responden.

Peningkatan taraf hidup responden juga ada yang disebabkan oleh faktor remiten atau kiriman dan bantuan dari sanak saudara, anak atau famili. Bantuan dari CSR bukanlah bantuan tunggal yang mereka peroleh. Bantuan dari pemerintah juga masih diterima beberapa rumah tangga responden. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan misalnya, telah membuat

responden dan keluarganya mampu mengakses pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Tingkat pemberdayaan Program

Program CSR yang menerapkan pemberdayaan semestinya memiliki unsur pendampingan dan pengarahan, selain memberikan bantuan berupa modal atau objek, berorientasi pada peningkatan kesadaran kritis penerima pemberdayaan.

Tabel 5 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat pemberdayaan program CSR ITP di Desa Lulut 2015

Tingkat Pemberdayaan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	22	73.3
Sedang	4	13.3
Tinggi	4	13.3
Total	30	100.0

Rendahnya tingkat pemberdayaan CSR ITP ini diakibatkan tidak adanya pendampingan berkelanjutan yang dilakukan ITP terhadap penerima program. Bantuan yang diberikan hanya bersifat pemberian, tanpa ada pendampingan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kapasitas penerima program.

Beberapa responden menyatakan ketidakpuasan mereka atas pemberian program CSR yang hanya memberi materi, tanpa adanya pengarahan lebih lanjut.

"... saya pinginnya mah ada pengarahan atau pelatihan atau pengajaran dari CSR. Tapi ini mereka cuma ngasih modal saja, tidak ada pengarahan. Saya ingin diajari bagaimana tips dan trinya gitu. Tapi ini tidak ada. hanya ngasih uang saja ..." (NKS, 49)

Minimnya pemberdayaan dinyatakan oleh responden yang mendapatkan bantuan permodalan dari CSR ITP. Bantuan yang mereka dapatkan terbilang cukup besar sebagai modal usaha. Akan tetapi mereka menyayangkan tidak adanya pelatihan atau pendampingan yang diberikan CSR ITP, untuk membantu mereka memanfaatkan modal yang diberikan dengan lebih bijaksana.

Tingkat Partisipasi Program

Keterlibatan penerima program pada keempat tahapan partisipasi Uphoff (1977) dapat mengindikasikan bahwa program dilaksanakan dengan melibatkan penerima program secara sadar, dan penerima program memiliki posisi tawar yang setara dengan CSR ITP.

Tabel 6 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat partisipasi program CSR ITP di Desa Lulut 2015

Tingkat Partisipasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	15	50.0
Sedang	22	36,7
Tinggi	4	13.3
Total	30	100.0

Kecenderungan responden menyatakan bahwa tingkat partisipasi penerima program rendah, sesuai dengan pernyataan beberapa informan bahwa program CSR cenderung diputuskan oleh CSR ITP. Warga Lulut hanya dapat menyampaikan keinginan dan pandangan mereka dalam Bilikom terkait program CSR, akan tetapi keputusan akhir terkait perencanaan program hingga evaluasi masih sepenuhnya berada di tangan CSR ITP.

"... bilikom mah buat apa, lebih baik ditiadakan saja. soalnya sama saja, apa yang disampaikan toh hanya sebatas pendapat. Nggak ada yang berubah setelah disampaikan di bilikom..." (MM, 38)

Implementasi Program CSR ITP

Implementasi program merupakan total pengukuran dari enam variabel pengukuran kinerja CSR ITP. Nilai total tersebut kemudian di golongkan dalam kelas rendah, sedang dan tinggi.

Secara keseluruhan, implementasi CSR ITP di Lulut tergolong dalam tingkat sedang. Masih rendahnya penilaian responden terhadap beberapa variabel menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR ITP masih belum sepenuhnya berlangsung dengan baik. Dari enam variabel pelaksanaan program CSR ITP yang diamati, hanya terdapat satu variabel yang menurut responden memiliki tingkat penerapan yang tinggi, yaitu tingkat kesesuaian.

Sementara variabel lainnya tidak dianggap tergolong tinggi dalam penerapannya.

Tabel 7 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat implementasi program CSR ITP di Desa Lulut 2015

Tingkat Implementasi	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	5	16.7
Sedang	14	46.7
Tinggi	11	36.7
Total	30	100.0

Secara garis besar, program CSR yang dijalankan masih bersifat mengatasi masalah sesaat. Bentuk pengorganisasian dalam penyaluran bantuan masih berupa kepanitiaan. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan juga masih terbilang hibah sosial, karena tidak diimbangi dengan adanya sumbangsih swadaya subjek penerima.

Subjek penerima program masih dipusatkan pada kaum miskin di Desa Lulut. Data pada gambar 9 menampilkan bahwa 33 persen responden yang merupakan penerima program CSR adalah orang miskin di Desa Lulut. Pemilihan peserta program anak asuh misalnya, selain prestasi akademik, latar belakang perekonomian penerima program juga menjadi pertimbangan. Penerima bantuan operasi katarak juga kebanyakan adalah penduduk Lulut yang sudah memasuki usia lanjut dengan latar belakang perekonomian lemah.

Potensi Konflik Sosial

Desa Lulut adalah desa yang memiliki sejarah konflik dengan ITP. Terdapat beberapa kejadian di masa lampau antara masyarakat Lulut dan ITP yang menyebabkan munculnya hubungan disosiatif. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan kepada beberapa informan, baik yang merupakan pihak yang dianggap mewakili ITP (dalam hal ini adalah koordinator Desa Lulut), perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga Desa Lulut, terdapat kejadian yang hingga menyebabkan kerugian berupa kerusakan aset milik ITP.

Selain konflik yang berkaitan dengan ITP, secara umum, terdapat beberapa kejadian konflik yang terjadi di Lulut. Seperti pada tahun 2013, saat dilaksanakan pemilihan kepala desa

yang menghadirkan 3 calon, muncul demonstrasi dari sebagian kelompok masyarakat. Hal ini karena ada satu bakal calon yang digugurkan, dianggap tidak memenuhi persyaratan dari pendidikan. Pengguguran salah satu calon itu menciptakan kekecewaan dari para pendukung calon tersebut yang akhirnya membuahkan demonstrasi yang berjumlah ratusan orang. Selanjutnya, pada 2014 terjadi demonstrasi masyarakat dalam tragedi Pamling. Pada tahun 2015, masyarakat menuntut uang ganti rugi 'Kerohiman' pada lahan TPPAS Lulut Nambo, serta terjadi keributan massa pada turnamen sepak bola Kades Cup 2 yang diselenggarakan oleh pihak desa.

Potensi Konflik Vertikal

Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi pada dua pihak yang berbeda posisi tawar. Dalam kasus ITP dan Lulut, konflik vertikal adalah konflik yang terjadi pada korporasi dan masyarakat desa yang berada di sekitar wilayah operasional korporasi tersebut.

Tabel 8 Jumlah dan persentase responden menurut potensi konflik vertikal di Desa Lulut 2015

Potensi Konflik Vertikal	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	23	76.7
Sedang	5	16.7
Tinggi	2	6.7
Total	30	100.0

Tanggapan responden pada saat wawancara dilakukan cenderung tertutup dan enggan membicarakan konflik antara ITP dan warga Lulut. Pada suatu kesempatan, wawancara responden sempat dihentikan oleh salah satu tetangga responden. Beliau menganggap kegiatan wawancara yang dilakukan adalah usaha untuk memprovokasi warga.

"... Kamu ini siapa? Mana surat izin nya? Kenapa tidak didampingi perangkat desa? Hentikan wawancaranya! Mau memancing keributan disini ya?..." (MPA, 49)

Setelah intervensi tersebut, responden yang tadinya mulai terbuka dan seperti ingin menceritakan sejarah konflik yang diketahuinya menjadi terlihat ketakutan dan akhirnya menjawab seadanya dan menyatakan bahwa

tidak pernah ada konflik apapun di Lulut, baik yang berkaitan dengan ITP maupun konflik lainnya.

Hal yang sama kembali terjadi ketika responden yang diwawancarai adalah petugas keamanan desa, mereka cenderung tidak menceritakan hal apapun terkait konflik di Lulut. Jawaban yang diberikan atas pertanyaan seputar konflik cenderung mencari aman, dan mereka menyatakan bahwa keadaan di Lulut baik-baik saja. Tidak pernah ada konflik vertikal yang terjadi.

Hasil survey yang didapatkan berbeda dengan hasil wawancara kualitatif yang dilakukan terhadap informan. Beberapa informan yang ditanyai terkait pandangan-pandangan kritis terhadap ITP memberikan pernyataan-pernyataan yang lebih tegas terbuka mengenai potensi konflik yang terdapat di Lulut. Tercatat bahwa pernah terjadi beberapa peristiwa yang menyebabkan munculnya ketegangan antara ITP dan warga Lulut. Misalnya pada saat terjadinya pembakaran *conveyor* beberapa tahun silam.

Terdapat beberapa keganjilan ketika wawancara akan dilakukan terhadap kepala Keamanan Desa Lulut. sebelumnya beliau memang sudah pernah diwawancarai terkait keamanan desa. pada saat pertama kali diwawancarai, beliau lebih terbuka dan menyatakan bahwa kondisi keamanan di Lulut cukup berfluktuasi.

“Keamanan Desa Lulut bisa dibilang ya aman, tidak aman, karena suka ada kejadian-kejadian di masyarakat” (HDN, 39)

Akan tetapi, ketika informasi terkait konflik hendak di dalam, beliau terlihat menghindari dan menjadi sulit untuk di temui.

Informasi yang berhasil dikumpulkan dari beberapa informan menyatakan pada tahun 2014, aksi massa yang lebih besar dibanding demonstrasi pilkades tahun 2013 pernah terjadi di Lulut. Permasalahan ini berawal dari pencurian yang terjadi di areal perusahaan ITP saat anggota Linmas Desa Lulut bertugas jaga Pamling (Pengamanan Lingkungan). Pada proses penelusuran pelaku pencurian, satpam

dari perusahaan kemudian menginterogasi anggota Linmas tersebut. Namun, dalam prosesnya anggota Linmas merasa diintimidasi dan dipukul oleh satpam ITP. Kejadian ini lalu cepat menyebar di masyarakat, sehingga melahirkan kemarahan massa. Ratusan orang kemudian mengepung kantor desa. Aksi lempar batu dan barang-barang lainnya tidak segan-segan dilakukan oleh masyarakat. Aksi itu bahkan membuat Kades Lulut terluka. Pihak kepolisian (Kapolres) pun harus turun tangan untuk mengamankan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada Bulan Mei, Tahun 2015, ratusan warga Desa Lulut melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk perusahaan ITP. Demonstrasi dari masyarakat itu terkait dengan PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan, yang dinilai oleh masyarakat sepihak. ITP melakukan pemutus hubungan kerja kepada tidak kurang 270 warga masyarakat desa binaan. PHK yang dilakukan oleh perusahaan sangat merugikan masyarakat, karena otomatis penghasilan dari masyarakat yang dipecat hilang. Adapun alasan perusahaan melakukan pemecatan adalah karena adanya penurunan produksi, di sisi lain juga karena adanya penurunan harga semen. Keadaan tersebutlah yang memaksa perusahaan untuk mengambil keputusan pemecatan kepada sebagian pekerjanya.

Kejadian lain di tahun 2015 yaitu terkait dengan keberadaan Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo di Desa Lulut dengan luas mencapai 40 hektar yang menciptakan reaksi di masyarakat. Permasalahan di TPPAS ini terkait dengan masalah tanah. Masyarakat yang sebelumnya merasa telah merawat dan menggunakan lahan yang sebenarnya milik Perhutani ini meminta ganti rugi berupa dana ‘Kerohiman’, yaitu dana penggantian atas biaya dan jasa perawatan dan pengolahan lahan. Selain itu, permasalahan semakin rumit lagi karena ternyata di antara masyarakat telah terjadi jual beli tanah garapan yang membuat penyelesaian permasalahan pembangunan TPPAS ini tidak bisa berjalan dengan mudah. Pihak pemerintah desa akhirnya sampai harus mengumpulkan puluhan warga yang terlibat dalam persengketaan ini di kantor desa untuk mencari jalan keluarnya. Sampai

saat ini persoalan tanah di TPPAS Nambo belum selesai seutuhnya.

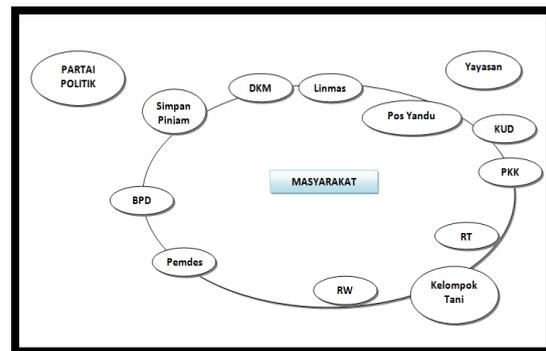
Kejadian terbaru, pada bulan Oktober tahun 2015, terjadi keributan massa pada pertandingan sepak bola pada kejuaraan Kades Cup 2. Salah satu tim merasa dirugikan oleh keputusan wasit saat pertandingan berlangsung. Aksi protes ini kemudian berlanjut dan melibatkan para pemain dan supporter yang lebih luas.

Dari ragam masalah keamanan yang ada di Desa Lulut menunjukkan jika sensitifitas warga sangat tinggi. Permasalahan yang menyangkut ruang hidup masyarakat seperti mata pencaharian, lahan, politik dan ruang sosial menjadi hal-hal yang sangat krusial di mata masyarakat sehingga jika ada gangguan akan dengan mudah untuk menyulut respon masyarakat secara luas.

“Orang Lulut lamun geus aya nu ngambek hiji ngambek kabeh. Eweuh nu ngagerakkeun, langsung naek, langsung bergerak semuanya (Kalo orang Lulut sudah ada yang marah satu orang, semuanya juga marah. Tidak ada yang menggerakkan, langsung naik, langsung bergerak semuanya” (HSJ, 57)

Kondisi masyarakat Lulut yang cenderung rentan konflik, yang jika dibiarkan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan desa. Upaya penyelesaiannya semestinya kembali melihat akar masalahnya yaitu penjaminan ruang hidup masyarakat Lulut, karena pergerakan massa yang terjadi pada dasarnya adalah respon warga atas kondisi hidup yang mereka hadapi dan rasakan. Dalam konteks praktis tentu upaya peningkatan keamanan menjadi sesuatu yang sangat penting. Di tingkat masyarakat telah terbentuk usaha untuk menjaga keamanan dengan membentuk poskamling dan regu kamling. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparat kemanan pun turut untuk diupayakan. Desa Lulut sendiri dibanding dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Klapanunggal memiliki jumlah aparat keamanan yang paling banyak, yaitu mencapai 50 orang, atau 15,5 persen dari jumlah hansip di tingkat Kecamatan Klapanunggal.

Berkaitan dengan pengorganisasian warga di Desa Lulut, terdapat beberapa kelembagaan yang berhasil diidentifikasi dari wawancara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa informan. Kelembagaan yang diidentifikasi oleh pihak perangkat desa sebagai kelembagaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Lulut. dari delapan kelembagaan yang teridentifikasi, kelembagaan Karang Taruna adalah kelembagaan yang terlihat lebih kritis dibanding kelembagaan lainnya dalam menanggapi keberadaan ITP di sekitar desa mereka. Berdasarkan kelembagaan yang ada, pihak perangkat desa telah mencoba merumuskan hubungan antar kelembagaan dalam bentuk diagram Venn, untuk memperlihatkan hubungan antara masing-masing kelembagaan. Akan tetapi, tidak semua kelembagaan yang teridentifikasi dari hasil pengumpulan data dengan wawancara mendalam tercantum dalam diagram kelembagaan yang di buat oleh pihak desa. bagi mereka, kelembagaan yang tercantum hanyalah kelembagaan yang memiliki relasi baik dengan pihak desa dan menguntungkan bagi masyarakat Desa Lulut.



Gambar 2 Diagram kelembagaan di Desa Lulut 2015

Terdapat beberapa kelembagaan lainnya yang teridentifikasi melalui wawancara mendalam yang dilaksanakan, yaitu Karang Taruna, KKPM, BPPKB, Galung, Pajajaran Muda, Pengajian, FBR, dan Polmas. Pergerakan dan sensitifitas kelembagaan-kelembagaan masyarakat lainnya ini menurut informan belum jelas terlihat. Hingga saat ini, kepentingan kedelapan kelembagaan ini masih bergerak seputar pemenuhan kebutuhan internal, dan tidak terlihat memiliki hubungan atau keberpihakan yang jelas kepada ITP.

Menurut keterangan informan, pergerakan kelembagaan kemasyarakatan di luar bentukan pemerintah desa di Lulut memang sangat terbatas. Kepala desa terkini, terlihat sangat menjaga pergerakan kelembagaan-kelembagaan di desa, agar tidak menimbulkan huru-hara di Desa Lulut, sehingga selain faktor internal masing-masing kelembagaan, tekanan elit penguasa cukup kuat untuk melemahkan pergerakan kelembagaan-kelembagaan nonbuatan pemerintah desa di Lulut. Selain kelembagaan, terdapat pula beberapa tokoh masyarakat yang dipandang cukup berwibawa dan berpengaruh dalam masyarakat. Pengaruh yang diberikan dilatarbelakangi oleh bermacam-macam faktor, antara lain baik kekuasaan hingga faktor ekonomi.

Ketokohan ke-10 tokoh lokal tersebut memiliki basis yang berbeda-beda. Pengaruh yang mereka berikan juga memiliki segmentasi tertentu, bergantung pada kelembagaan masyarakat yang mereka ikuti.

Beberapa tokoh lokal tersebut, ada yang memiliki keberpihakan pada ITP, dan ada pula yang memosisikan diri tidak terlalu dekat dengan ITP dan berusaha memandang ITP secara kritis. Akan tetapi, tokoh-tokoh yang berusaha memandang ITP secara kritis, tidak terang-terangan atau secara ekstrim memosisikan diri berlawanan dengan ITP.

Potensi Konflik Horizontal

Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara pihak yang memiliki nilai tawar yang setara. Dalam konteks Desa Lulut, konflik horizontal yang dimaksud adalah konflik antara sesama warga Desa Lulut. Persentase tingkat konflik horizontal di Lulut terlihat lebih rendah dibanding konflik vertikal yang terjadi. Apabila diperbandingkan, persentase responden yang menyatakan bahwa di Lulut terdapat konflik vertikal lebih tinggi dibandingkan dengan konflik horizontal.

Perubahan-perubahan yang terjadi di Lulut pascamasuknya korporasi, adalah salah satu penyebab mudahnya terjadi ketegangan antara ITP dan masyarakat. Perubahan tata guna lahan, kepemilikan lahan dan perubahan ekologis menyebabkan terdapat berbagai perbedaan dalam sistem sosial dan perekonomian

masyarakat Lulut. Selain menyebabkan ketegangan antara masyarakat dan korporasi, pertambangan di sekitar Lulut telah merubah pola hubungan antara sesama warga Lulut.

Tabel 9 Jumlah dan persentase responden menurut potensi konflik horizontal di Desa Lulut 2015

Potensi Konflik Horizontal	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	25	83.3
Sedang	4	13.3
Tinggi	1	3.3
Total	30	100.0

Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan, diperoleh penjelasan tentang perubahan pola hubungan antara sesama warga Desa Lulut sebelum dan sesudah masuknya tambang, baik tambang ITP maupun tambang milik korporasi lainnya. Perubahan yang terjadi mengarah pada perubahan pola nafkah, pola penguasaan lahan, pola organisasi kerja, pola transaksi produksi, pola sistem budidaya pertanian, pola tatanan norma sosial dan pola etika ekonomi.

Dalam pemenuhan nafkah, perubahan pola nafkah warga Lulut dari pertanian menjadi pada bidang lainnya membuat terjadinya perubahan dalam ikatan sosial warga. Ikatan sosial yang terjadi dalam budaya pertanian jelas berbeda dengan yang dialami pada sektor perekonomian lainnya yang cenderung kapitalis dan mengejar keuntungan. Hal ini seiring dengan adanya perubahan pola penguasaan lahan, pola organisasi kerja, pola transaksi, norma, serta orientasi perekonomian.

Awalnya perubahan pola relasi antar sesama warga Lulut ini diduga dapat menjadi potensi konflik horizontal. Masuknya korporasi dengan program CSR CSR nya dapat saja menjadi potensi konflik baru, misalnya dengan menciptakan perebutan akses dan sumber daya terhadap bantuan yang diberikan oleh CSR ITP. Akan tetapi, perubahan tersebut ternyata tidak memengaruhi kehidupan warga secara keseluruhan. Kedamaian dan kerukunan sosial tetap dipelihara oleh warga secara umum, meskipun beberapa responden dan informan menyatakan bahwa susasana sosial di Lulut sudah tidak seperti masa sebelum hadirnya

korporasi di lingkaran Desa Lulut. Kuatnya basis keagamaan di Lulut adalah salah satu faktor yang menyebabkan masih eratnya ikatan sosial di Lulut.

Hubungan Program CSR Dengan Potensi Konflik Sosial

Pendugaan bahwa praktek CSR yang dilakukan ITP memiliki hubungan dengan potensi terjadinya konflik vertikal dan horizontal antara ITP dan masyarakat Lulut, dapat diuji dengan cara melihat hubungan antara variabel-variabel penilaian terhadap implementasi program CSR ITP di Lulut.

Berdasarkan tabel 10 dan 11, terlihat bahwa secara keseluruhan, implementasi program CSR ITP di Desa Lulut tidak memiliki korelasi nyata dengan tingkat konflik, baik vertikal dan horizontal. Hal ini diperkuat dengan hasil uji Rank Spearman antara enam variabel implementasi program CSR ITP di Desa Lulut dengan tingkat konflik vertikal maupun konflik horizontal.

Tabel 10 Jumlah dan persentase responden menurut implementasi program CSR dan tingkat konflik vertikal di Desa Lulut 2015

Implementasi Program CSR	Persentase (%)			Total
	Tingkat Konflik Rendah	Tingkat Konflik Sedang	Tingkat Konflik Tinggi	
Rendah	80.0	20.0	0.0	100.0
Sedang	85.7	14.3	0.0	100.0
Tinggi	81.8	9.1	9.1	100.0
Total	83.3	13.3	3.3	100.0

Tabel 11 Jumlah dan persentase responden menurut implementasi program CSR dan tingkat konflik horizontal di Desa Lulut 2015

Implementasi Program CSR	Persentase (%) Tingkat Konflik Horizontal			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	80.0	20.0	0.0	100.0
Sedang	85.7	14.3	0.0	100.0
Tinggi	81.8	9.1	9.1	100.0
Total	83.3	13.3	3.3	100.0

Tabel 12 Koefisien korelasi pengukuran program CSR terhadap konflik vertikal dan horizontal di Desa Lulut tahun 2015

Koefisien korelasi pada tabel 12 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel implementasi program CSR ITP di Desa Lulut yang berkorelasi nyata dengan tingkat konflik vertikal maupun horizontal di Desa Lulut.

Pengukuran Program CSR	Koefisien Korelasi Terhadap Konflik Vertikal	Koefisien Korelasi Terhadap Konflik Horizontal
Tingkat Efektivitas	-0.257	-0.150
Tingkat Kesesuaian	0.307	0.352
Tingkat Keberlanjutan	-0.269	-0.036
Tingkat Pemberdayaan	0.345	0.179
Dampak Kesejahteraan	0.124	-0.030
Tingkat Partisipasi	-0.296	-0.053

Secara kuantitatif, hal ini terjadi karena responden memang tidak terbuka terkait konflik di Lulut, apalagi ketika pertanyaan diarahkan kepada konflik yang melibatkan warga Desa Lulut dengan ITP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil deskripsi pengukuran program CSR ITP, konflik vertikal, konflik horizontal dan hubungan diantaranya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program CSR ITP di Desa Lulut terlihat masih sebatas pada tahapan *charity* pada karakteristik CSR.
2. Secara kuantitatif potensi konflik di Desa Lulut tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan warga terlihat enggan membicarakan hal-hal terkait konflik, terutama yang berkaitan dengan ITP. Keengganan ini disebabkan berbagai faktor menyebabkan timbulnya keengganan warga membicarakan konflik, di antaranya, terdapat pengalaman dimasa lalu, ketika banyak isu kritis yang berkembang di masyarakat, beberapa orang kemudian di panggil oleh ITP dan dianggap melakukan pencemaran nama baik ITP.

3. Pelaksanaan program CSR di Desa Lulut ternyata tidak menyebabkan munculnya konflik horizontal antara sesama warga Lulut.
4. Hasil uji statistik tersebut ternyata tidak sejalan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan, khususnya untuk konflik vertikal. Hasil wawancara mendalam justru menyatakan hal yang sebaliknya: terdapat potensi konflik vertikal di Desa Lulut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan program CSR sebaiknya ITP sebagai pelaksana lebih memperhatikan beberapa aspek terkait partisipasi dan keterlibatan masyarakat Desa Lulut dalam rangka melaksanakan pengelolaan konflik sosial baik berupa konflik vertikal maupun konflik horizontal.
2. Program CSR yang dilakukan ITP sebaiknya lebih mengedepankan pemberdayaan, bukan hanya memberikan bantuan yang bersifat penyelesaian masalah sementara saja. selama ini, bantuan hanya diberikan tanpa pendampingan lebih lanjut, sehingga bantuan yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian.
3. Untuk pendalaman penelitian selanjutnya, studi tentang hubungan antara kinerja CSR terhadap dukungan masyarakat perlu untuk dilakukan. Penelitian tentang hubungan antara kinerja program CSR dan potensi sosial ini dapat diperdalam dan dispesialisasikan dalam bentuk pengukuran terhadap dukungan masyarakat terhadap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambadar J. 2008. CSR dalam praktik di indonesia wujud kepedulian dunia usaha. Jakarta: Alex Media Komputindo
- Ardianto E, Machfudz D. 2011. Efek kedermawanan pebisnis dan CSR. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Budimanta A, Prasetijo A, Rudito B. 2004. *Corporate social responsibility*

jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)

Cohen JM, Uphoff N. 1977. Rural development participation: concepts and measure for project design, implementation and evaluation, center for international studies, rural development committee, monograph no. 2. Ithaca: Cornell University.

Fisher S, Abdi DI, Ludin J, Smith R, Williams S, Williams S. 2001. Mengelola konflik: keterampilan & strategi untuk bertindak. Kartikasari SN, Tapilatu MD, Maharani R, Rini DN, penerjemah. Jakarta: The British Council, Indonesia

Fajar M. 2009. Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia: studi tentang penerapan ketentuan *corporate social responsibility* pada perusahaan multi nasional, swasta nasional dan badan usaha milik negara. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Kinseng R. 2015. Konflik Nelayan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Musdalifah. 2009. Konflik agraria dalam relasi antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat (kasus konflik antara petani dengan PT.PP LONSUM di Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Disertasi*. Diunduh dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f37a36b6ee43f77056c67e2905ac9798.pdf>

Nasdian FT. 2014. Pengembangan masyarakat. Jakarta [ID]: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nursahid F. 2006. Tanggung jawab sosial BUMN. Depok: Primamedia.

Poerwanto. 2010. *Corporate social responsibility* menjinakkan gejala sosial di era pornografi. Jember: Pustaka Pelajar

Prayogo D, Hilarius Y. 2012. Efektivitas program CSR/CD dalam pengentasan kemiskinan studi peran perusahaan

- geotermal di Jawa Barat. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 1(17), 1-22.
- Prayogo D. 2010. Anatomi konflik antara korporasi dan komunitas lokal pada industri geotermal di Jawa Barat. *Jurnal Makara Seri Sosial-Humaniora*, 1(14), 25-34.
- Prayogo D. 2011. Program *corporate social responsibility* dan *community development* pada industri tambang dan migas. *Jurnal Makara Seri Sosial-Humaniora*, 1 (15) , 43-58.
- Pruit DG, Rubin JZ. 1986. *Social Conflict Escalation, Stalemate, and Settlement*. McGraw-Hill, Inc.
- Rosyida I, Nasdian FT. 2011. Partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan program *corporate social responsibility* (CSR) dan dampaknya terhadap komunitas pedesaan. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi Dan Ekologi Manusia*, 1 (5), 57-78.
- Singarimbun M, Sofian E. 1989. *Metode penelitian survai*. Jakarta [ID]: LP3ES.
- Siwi M. 2012. *Dinamika politik pemberdayaan dalam corporate social responsibility (CSR) (Studi kasus program CSR PT Holcim Indonesia Pabrik Narogong, di Desa kembang kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)*. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Sjaf S. 2014. *Politik etnik dinamika politik lokal di Kendari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjaf S. 2012. *Profil komunitas Desa Lulut*.
- Soekanto S. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Sukada S, Wibowo P, Ginano K, Jalal, Kadir I, Rahman T. 2007. *Membumikan bisnis berkelanjutan memahami konsep & praktik tanggung jawab sosial perusahaan*. Jakarta: Indonesia Business Links
- Wibisono Y. 2007. *Membedah konsep & aplikasi CSR corporate social responsibility*. Gresik: FASCHO PUBLISHING

